

KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Fadhilatus Syarifah¹, Abd. Aziz², Nur Efendi³

¹²³Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;

¹fasyariffa18@gmail.com, ²abdaziz@uinsatu.ac.id, ³nurefendi2016@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the concepts of leadership and Islamic educational policy and their relationship to improving the quality of education. The study employed a qualitative approach with library research, drawing on relevant books, scientific journals, and official documents. Data collection was conducted through documentation studies, while data analysis employed content analysis. The results indicate that Islamic educational leadership is a key factor in the success of educational institutions. Leadership is not only defined as the ability to influence and direct, but also as a mandate that carries moral and spiritual responsibility. Furthermore, Islamic educational policy serves as a strategic instrument in directing the implementation of education to align with established goals. This policy is not merely administrative in nature but also embodies normative Islamic values oriented toward the development of character, spirituality, and intellectual development of students. Leadership and Islamic educational policy have a complementary relationship. Effective leadership will result in appropriate and implementable policies, while good policies require strong leadership to ensure optimal implementation. Therefore, strengthening leadership and developing adaptive and sustainable Islamic educational policies are crucial steps in realizing quality Islamic education.*

Keywords: *leadership, policy, Islamic education*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan dan kebijakan pendidikan Islam serta keterkaitan keduanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam merupakan faktor kunci dalam keberhasilan lembaga pendidikan. Kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memengaruhi dan mengarahkan, tetapi juga sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Di sisi lain, kebijakan pendidikan Islam berperan sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai-nilai normatif Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter, spiritualitas, dan intelektualitas peserta didik. Kepemimpinan dan kebijakan pendidikan Islam memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kepemimpinan yang efektif akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan implementatif, sedangkan kebijakan yang baik memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk menjamin pelaksanaannya secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan dan pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif dan berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas.

Kata Kunci: kepemimpinan, kebijakan, pendidikan Islam

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, moral, serta peradaban umat. Dalam konteks kelembagaan pendidikan, keberhasilan suatu institusi tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau sarana prasarana, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya (Nasution, 2020). Kualitas tersebut erat kaitannya dengan kepemimpinan yang dijalankan, karena pemimpin menjadi penggerak utama dalam mengarahkan, mengelola, dan mengembangkan potensi lembaga pendidikan.

Kepemimpinan pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, serta memperoleh kepercayaan, ketaatan, dan loyalitas dari anggota yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan bersama (Prasetyo, 2014). Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki peran pedagogis dan moral dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan visi, misi, serta nilai-nilai pendidikan secara efektif.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan memiliki landasan yang kuat karena bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta telah dipraktikkan secara nyata sejak masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, hingga al-Khulafa' al-Rasyidin. Konsep kepemimpinan dalam Islam tidak hanya menekankan aspek kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab, keteladanan, keadilan, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan (Munfaridah, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan praktik manajerial yang profesional.

Kebijakan pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam mengatur arah dan pelaksanaan pendidikan. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendidikan Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, baik melalui sekolah umum maupun madrasah.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami berbagai perubahan, terutama sejak era reformasi. Perubahan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan globalisasi dan modernitas, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum bagi pengembangan pendidikan Islam di berbagai jenjang pendidikan, sekaligus memperkuat posisi pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, kepemimpinan dan kebijakan pendidikan Islam merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan yang efektif akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan implementatif, sedangkan kebijakan yang baik

membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengelola dan melaksanakannya secara optimal. Oleh karena itu, kajian mengenai kepemimpinan dan kebijakan pendidikan Islam menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Islam yang adaptif, berdaya saing, serta tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) menurut Zed (2014) merupakan suatu rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan membaca, mencatat, serta mengolah bahan tersebut sebagai bagian dari proses penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kebijakan pendidikan Islam. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif berdasarkan perspektif teoritis yang relevan (Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku-buku rujukan utama yang membahas kepemimpinan pendidikan, kebijakan pendidikan, serta pendidikan Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan aktualitas informasi (Sugiyono, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji, membaca, serta mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam sumber data untuk menemukan pola, konsep, serta hubungan antar variabel yang diteliti.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi: (1) reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan topik penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis secara menyeluruh. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi yang digunakan agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep kepemimpinan dan kebijakan dalam pendidikan Islam serta relevansinya dengan kondisi pendidikan saat ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan Pendidikan Islam

Secara etimologis, kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang setelah mendapat awalan “me” menjadi “memimpin”, yang bermakna menuntun, mengarahkan, dan membimbing. Istilah ini juga memiliki makna yang sepadan dengan mengelola, memandu, serta melatih dalam arti mendidik dan mengajarkan seseorang agar mampu melakukan sesuatu secara mandiri. Sehingga “memimpin” dipahami sebagai suatu aktivitas, sedangkan individu yang melaksanakannya disebut sebagai pemimpin (Fazilah, 2023).

Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, dan membina orang lain untuk mencapai tujuan tertentu (Northouse, 2018). Kepemimpinan dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam memengaruhi kelompok yang dipimpinnya agar mampu melaksanakan tugas secara efektif demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks pendidikan Islam, kepemimpinan memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi faktor penentu keberhasilan seluruh aktivitas yang berlangsung di dalam lembaga pendidikan Islam tersebut (Usman, 2014).

Kepemimpinan dalam pendidikan Islam mencakup berbagai aspek penting, seperti perilaku pemimpin, gaya dalam memimpin, serta cara memengaruhi para bawahan. Selain itu, kepemimpinan juga berkaitan dengan kemampuan dalam membangun semangat kerja, menjalin hubungan yang harmonis antara pemimpin dan bawahan, serta menentukan kualitas hasil kerja yang dicapai oleh anggota yang dipimpinnya (Mardia, 2022). Dalam perspektif Islam, konsep kepemimpinan telah disebutkan dalam Al-Qur'an melalui berbagai istilah. Salah satunya adalah *khalifah*. Menurut penafsiran Hamka dan Tabataba'i dalam Rosadi (2020), manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi dengan tujuan menegakkan syariat serta menjaga kelestarian kehidupan dari pengaruh hawa nafsu. Hal ini dimungkinkan karena manusia dianugerahi akal yang memungkinkannya untuk bersyukur, berpikir secara mendalam, serta memahami hakikat keberadaannya, termasuk mengenali siapa penciptanya dan tujuan dari penciptaannya tersebut. Peran manusia sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas menegakkan aturan-Nya serta menjaga keseimbangan kehidupan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan *khalifah* di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Menurut tafsir Ibnu Katsir, istilah *khalifah* dalam ayat ini merujuk pada makna pemimpin atau pengelola bumi yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga, mengatur, dan memakmurkan kehidupan sesuai dengan ketentuan-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa seorang pemimpin (kepala sekolah, guru, atau pengelola lembaga) adalah *khalifah* yang memikul amanah besar. Ia tidak hanya bertanggung jawab terhadap keberhasilan akademik, tetapi juga terhadap pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, kepemimpinan harus dijalankan dengan landasan ilmu, nilai-nilai Islam, serta tanggung jawab yang tinggi.

Dalam kepemimpinan pendidikan islam juga terdapat pula konsep *imam*. Menurut Munawar (2002) kata *imam* dalam Al-Qur'an memiliki beberapa arti yaitu nabi, pedoman, kitab/buku atau teks, jalan lurus, dan pemimpin. Konsep *imam* disini adalah pemimpin yang tidak hanya mengarahkan kepada kebaikan, tetapi juga mampu menjadi teladan dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.”

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, kata *imam* dalam ayat ini merujuk pada pemimpin yang menjadi panutan dalam kebaikan. Kepemimpinan para nabi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yakni membimbing umat menuju jalan yang benar berdasarkan wahyu. Mereka tidak sekadar memerintahkan, tetapi juga menjadi teladan nyata dalam mengamalkan ajaran yang disampaikan. Ayat ini menegaskan bahwa seorang pemimpin pendidikan harus berperan sebagai *imam*, yaitu pembimbing yang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menjadi teladan dalam nilai-nilai keislaman. Guru dan pemimpin lembaga pendidikan dituntut untuk mengintegrasikan aspek akademik, moral, dan spiritual dalam proses pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari terbentuknya karakter peserta didik yang berakhlak mulia.

Adapun istilah ketiga pemimpin dalam Islam ialah ulil amri, mengacu pada pihak yang memiliki otoritas kepemimpinan serta mampu menjalankan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan (Jamal, 2014). Prinsip ini tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin, serta pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan. Dengan demikian, konsep kepemimpinan

dalam Islam tidak hanya menekankan aspek kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab moral, keteladanan, serta nilai-nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik kepemimpinan dalam pendidikan Islam pada dasarnya merujuk pada sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah Saw. yang meliputi *shidiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*. *Shidiq* (jujur) mencerminkan komitmen terhadap kebenaran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. *Amanah* (dapat dipercaya) menunjukkan sikap tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjalankan tugas serta menjaga kepercayaan yang diberikan. *Tabligh* (komunikatif) mengandung makna bahwa pemimpin pendidikan Islam harus mampu menyampaikan informasi dan nilai-nilai kebaikan secara efektif kepada seluruh pihak. Sementara itu, *fathonah* (cerdas) menggambarkan kemampuan intelektual seorang pemimpin dalam memberikan arahan, nasihat, serta solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai permasalahan (Sakdiah, 2016).

Selain karakteristik tersebut, menurut Rohmat (2010) kepemimpinan dalam pendidikan Islam juga dapat dilihat dari berbagai gaya kepemimpinan yang diterapkan. Gaya kepemimpinan tersebut meliputi gaya kepemimpinan otokratik, gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis, gaya kepemimpinan *Laizess Faire*, gaya kepemimpinan transformatif, gaya kepemimpinan paternalistik, dan gaya kepemimpinan militeristik. Menurut Mulyadi dan Widi Winarso dalam Sri, dkk (2022), gaya kepemimpinan otokratik ditandai dengan dominasi pemimpin dalam menentukan kebijakan dan pengambilan Keputusan. Sebaliknya, gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis menekankan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan Keputusan (Rohmat, 2010). Gaya *laissez-faire* memberikan kebebasan yang luas kepada bawahan dalam menjalankan tugasnya (Mardia, 2022). Adapun gaya kepemimpinan transformasional berfokus pada kemampuan pemimpin dalam mengoptimalkan sumber daya organisasi melalui kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nengsih et al. 2020). Kemudian, gaya kepemimpinan paternalistik menunjukkan peran pemimpin sebagai figur yang melindungi dan menjadi tumpuan harapan bagi anggota organisasi (Mardia, 2022). Sementara itu, menurut Bahri et al. (2025) gaya kepemimpinan militeristik dicirikan oleh pengambilan keputusan secara cepat dan tegas, terutama dalam situasi yang berisiko tinggi tanpa melibatkan partisipasi anggota.

B. Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang bersifat politis dan dirancang secara sadar melalui pertimbangan yang matang serta terarah, yang dilakukan oleh organisasi, lembaga, maupun pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sari, 2020). Dalam setiap aspek kehidupan, kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan aktivitas serta membatasi perilaku agar berjalan secara sistematis dan terarah. Hal ini juga berlaku dalam bidang pendidikan yang kemudian dikenal sebagai kebijakan pendidikan.

Menurut Sari (2020) kebijakan pendidikan merupakan suatu proses perumusan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan pendidikan yang disusun berdasarkan visi dan misi pendidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan dalam kurun waktu tertentu secara terencana dan sistematis.

Pendidikan Islam di Indonesia telah berkembang sejak masa sebelum kedatangan bangsa Eropa, termasuk Belanda. Perkembangannya berjalan seiring dengan proses penyebaran Islam di Nusantara dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap pendidikan Islam melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas serta memperluas akses pendidikan bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.

Dalam perjalanan sejarahnya, sistem pendidikan di Indonesia mengalami dinamika yang cukup panjang. Pada masa awal kemerdekaan, terdapat dua sistem pendidikan yang berkembang secara bersamaan, yaitu sistem pendidikan umum yang bersifat sekuler sebagai warisan kolonial Belanda, serta sistem pendidikan Islam yang tumbuh di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme pendidikan yang memengaruhi arah perkembangan pendidikan nasional. Memasuki era reformasi, perhatian terhadap lembaga pendidikan keagamaan mulai meningkat, meskipun pada awalnya masih terdapat kecenderungan memandang pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan umum. Hal ini kemudian diperkuat melalui kebijakan pemerintah, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Pada awalnya, pendidikan agama belum sepenuhnya menjadi bagian dari kurikulum sekolah umum karena adanya anggapan bahwa pendidikan agama merupakan tanggung jawab keluarga. Selain itu, pendidikan agama juga dianggap sebagai domain lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pondok pesantren. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembentukan karakter, pendidikan agama kemudian diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional sebagai komponen yang tidak terpisahkan.

Secara konseptual, pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam dengan prinsip utama tauhid. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan bersumber dari dan kembali kepada Allah, sehingga menjadi dasar dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam. Prinsip tauhid tidak hanya membentuk aspek kognitif, tetapi juga memengaruhi pembentukan sikap, perilaku, dan pandangan hidup peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki orientasi yang menyeluruh, mencakup aspek intelektual, spiritual, dan moral.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kebijakan ini memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan melalui sistem desentralisasi, sehingga setiap sekolah memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai yang dianut. Lembaga pendidikan berbasis agama diberikan ruang untuk mengembangkan sistemnya sesuai ajaran agama, dengan tetap memperhatikan prinsip pengawasan dan akuntabilitas agar pelaksanaannya berjalan secara efektif.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan nasional yang berfungsi sebagai sumber nilai dalam pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, meliputi aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk manusia yang utuh dan berkarakter.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan pendidikan secara keseluruhan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki harapan besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam agar mampu bersaing dan menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam (PAI) ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan bagi peserta didik Muslim, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidikan agama bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Sementara itu, pendidikan keagamaan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman mendalam tentang agama serta mampu menjadi ahli di bidang tersebut. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai spiritual.

Dalam implementasinya, Pendidikan Agama Islam memiliki posisi penting dalam kurikulum nasional, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keberadaannya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan akademik, tetapi juga pada landasan filosofis negara, seperti sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” serta ketentuan dalam UUD 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 juga menegaskan bahwa pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan nasional. Sehingga dapat dipahami bahwa pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional yang

memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pendidikan Islam perlu terus dilakukan secara berkelanjutan melalui perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, serta evaluasi yang berkesinambungan agar mampu menjawab tantangan perkembangan zaman secara optimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam merupakan aspek fundamental yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di lembaga Islam. Kepemimpinan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mengarahkan dan memengaruhi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam perspektif Islam, konsep kepemimpinan tercermin melalui istilah *khalifah*, *imam*, dan *ulil amri*, yang menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki peran sebagai pengelola, pembimbing, sekaligus teladan dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, kepemimpinan pendidikan Islam harus berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah serta diwujudkan melalui karakter *shidiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*. Selain itu, penerapan berbagai gaya kepemimpinan yang adaptif juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan.

Di sisi lain, kebijakan pendidikan Islam merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai-nilai normatif Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter, spiritualitas, dan intelektualitas peserta didik. Di Indonesia, kebijakan pendidikan Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari adanya dualisme sistem pendidikan hingga integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

Dengan demikian, kepemimpinan dan kebijakan pendidikan Islam memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Kepemimpinan yang efektif akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan implementatif, sedangkan kebijakan yang baik membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan kualitas kepemimpinan serta pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia serta siap menghadapi tantangan zaman.

DAFTAR RUJUKAN

Bahri, Muhammad Shaiful. Citriadin, Yudin. Dan Rustam. (2025). Kepemimpinan Militeristik Pendidik. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika*, Vol.6 No.1.

- Fazillah, Nur. (2023). Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *INTELEKTUALITA: Journal of Education Sciences and Teacher Training* Vol.12 No.1.
- Giantara, F., & Amiliya, R. (2021). Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam Sebagai Bagian Dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis). *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 11 No. 2.
- Jamal, Khairunnas. Kadarusman. (2014). Terminologi Pemimpin dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik). *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39 No.1.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mardia, S, Muhammad Mukhtar. (2022). Analisis Tipologi dan Gaya Kepemimpinan dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Edu-Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.1 No.2.
- Masykur, A. D. A., & Sunarto. (2025). Kepemimpinan dalam Konteks Pendidikan Islam. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2.
- Munawar, Said Aqil Husin Al. (2002). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Munfaridah, Tuti. (2012). Kepemimpinan dalam Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.14 No.1
- Nengsih, Sukarti. Gusfira, Rika. Pratama, Rivaldo. (2020). Kepemimpinan Transformatif di Lembaga Pendidikan Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.2 No.1
- Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). Sage Publications.
- Rohmat. (2010). *Kepemimpinan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. STAIN Press.
- Sahbana, M. D. Rahman & Dinata S. (2022). Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Reformasi. *At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2 No.2.
- Sahroni., Su'aidi., El Widdah, M., Anisyah, N., & Indrawati. (2025). Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam. *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7 No. 1.
- Sakdiah. (2016). Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-sifat Rasulullah. *Jurnal Al-Bayan*, Vol.22 No.33.
- Sari, Diana. (2025). *Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Thunder Angkasa.
- Triarni, A. Witari & Panggabean. (2024). Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah. *JRPP: Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 4
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.